

## BAB II

### KEMUNCULAN KARAKTERISTIK *TRANSNATIONAL ADVOCACY*

#### *NETWORK (TAN) SEBAGAI GERAKAN ASNLF*

Dalam konsepnya Margaret Keck dan Kathryn Sikkink, untuk melihat upaya sebuah jaringan advokasi maka perlunya mengidentifikasi karakteristik sebuah jaringan tersebut. Bertujuan untuk memvalidasi gerakan ASNLF sebagai jaringan advokasi yang dimaksudkan oleh TAN. Agar kesesuaian analisis yang dipakai antara teori dan kasus kajian ini dapat memunculkan kesimpulan yang empiris. Maka oleh sebab itu, pentingnya untuk menjustifikasi bahwa ASNLF sebagai TAN sebelum menjawab rumusan masalahnya.

Ada pun, munculnya gerakan ASNLF disebabkan oleh pengkhianatan yang dilakukan oleh Belanda dan Indonesia kepada Aceh kepada perjanjian-perjanjian yang mereka lakukan. Lalu, gerakan ini menganggap bahwa tidak sah antara Belanda yang menganggap bahwa Aceh menjadi bagian darinya, dan Indonesia ilegal mengatakan Aceh telah masuk ke wilayahnya pada tahun 1949. Maka, gerakan ini untuk menyatakan secara hukum bahwa Aceh legal statusnya sebagai negara saat ini, sebab mereka dahulu berdaulat namun terputus maka mereka melanjutkan keputusan pemerintahan ini dan membebaskan Aceh dari Indonesia.

Aktivisme Gerakan ASNLF dapat diidentifikasi sebagai *Transnational Advocacy Network (TAN)* yang dipaparkan oleh Keck & Sikkink. TAN merupakan jaringan yang terdiri dari aktor-aktor internasional yang bekerja terhadap suatu isu, yang diikat oleh nilai-nilai bersama, wacana bersama dan pertukaran informasi serta layanan yang padat (Keck & Sikkink, 1998, hal. 89). Kemunculan TAN sendiri didorong oleh tiga faktor yaitu; *boomerang pattern*, *political entrepreneurs* dan

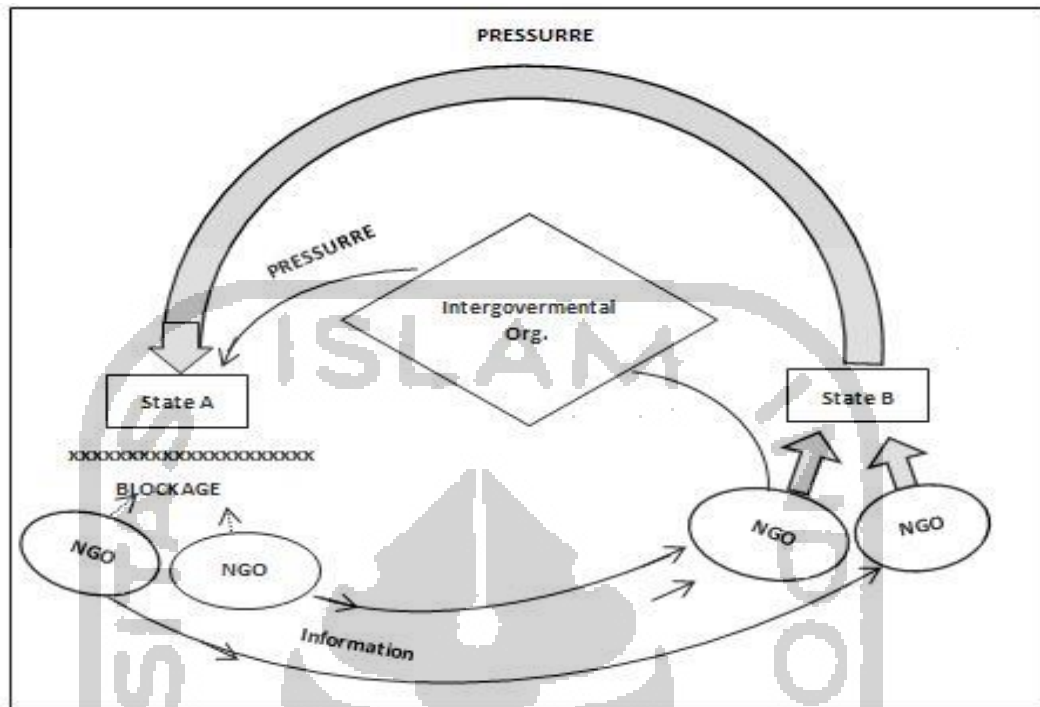
*international Organization and Conferences* (Keck & Sikkink, 1998, hal. 93).

Ketiga faktor tersebut merupakan poin utama yang dibahas dalam bab ini.

## **2.1 *Boomerang Pattern* dalam Gerakan ASNLF**

Pola bumerang (*boomerang pattern*) muncul ketika kelompok-kelompok lokal ataupun individu memiliki sebuah klaim atas masalah tertentu, tapi pemerintah tidak merespons mereka, lalu kelompok ini mencari koneksi internasional (Keck & Sikkink, 1998, hal. 93). Koneksi tersebut dimaknai untuk meyakinkan dan memperkuat permintaan kelompok domestik, sebagai upayanya membuka perdebatan masalah baru, dan kemudian menyuarkan masalah ini ke domestik (Keck & Sikkink, 1998, hal. 93). Pada intinya, pola bumerang ini muncul ketika gerakan lokal tersebut tidak memiliki akses ke institusi negara, lalu mereka akan membentuk jaringan transnasional dalam memperkuat klaim mereka, agar dapat menekan 'aktor target' dari luar (Keck & Sikkink, 1998, hal. 93).

Gambar 3. Pola Bumerang



Sumber: (Keck & Sikkink, 1998, hal. 13).

Karakteristik pola ini menjadi kekuatan utama dalam kampanye dengan tujuan merubah kebijakan atau perilaku domestik suatu negara terhadap masalah yang di advokasikan (Keck & Sikkink, 1998, hal. 93). Menurut Keck & Sikkink, pola bumerang muncul ketika aspirasi dan dialektika antar pemerintah dan masyarakat domestik terputus. Alhasil, masyarakat tidak dapat aksesnya ke institusi politik atas masalah yang disuarakan (Keck & Sikkink, 1998, hal. 93). Dalam konteks kajian ini, munculnya gerakan ASNLF berasal dari Indonesia. Adapun, pola bumerang yang dimaknai TAN menerjemahkan bahwa Indonesia sebagai *State A*, Advokasi masalahnya berupa hak untuk membebaskan diri Aceh dari Indonesia.

Adapun, Hasan Tiro sebagai penggagas gerakan ini mengeluarkan dekritnya pada 4 Desember 1976, menegaskan dan membuktikan kembali status hukum Aceh adalah legal di bawah Hukum Internasional yaitu mengacu pada resolusi PBB 1974

yang menyatakan *self-determination* (hak menentukan nasib sendiri) (Tiro, 1986, hal. 10-11).

Justru Pemerintah di bawah kendali rezim Soeharto pada saat itu, kerap melakukan distorsi pada gerakan ini yang dianggap separatis dan ilegal. Alhasil, sikap diskursif tidak dapat dilakukan antara ASNLF dan Pemerintah Indonesia pada saat itu. Maka aspirasi dan ruang pembicaraan antara individu atau kelompok domestik dengan aktor negara atau pemerintah dianggap terputus ketika hukum yang menangani masalah tersebut tidak diterima serta pemerintah tidak responsif terhadap hal tersebut (Keck & Sikkink, 1998, hal. 93). Dalam hal ini, pemerintah akhirnya memblokir (*blockage*) hak dari gerakan ASNLF.

TAN juga menjabarkan, bahwa jaringan membawa ide, norma, dan wacana baru ke dalam ruang dialektika kebijakan, dan berfungsi sebagai sumber informasi dan kesaksian (Keck & Sikkink, 1998, hal. 90). Ide ini berhasil menarik simpati masyarakat lokal dari seorang individu. Dengan berdirinya ASNLF dan visimisinya tersebut menggugah semangat nasionalisme dan menunjukkan wacana baru bagi orang Aceh bahwa sedang terjadi permasalahan besar di daerahnya (Ross, 2005, p. 4).

Akibatnya, mereka melahirkan aktor yang visioner dan memunculkan strategi menarik, untuk aski politiknya di wilayah yang belum tampak terselesaikan, masalahnya justru berbuah menjadi aksi kolektif di bawah jaringan transnasional (Keck & Sikkink, 1998, hal. 91). Sebagai hal-nya terbentuk organisasi SIRA, yang menjadi inisiator pada tahun 1999 dalam mengumpulkan massa untuk berunjuk rasa meminta Aceh direalisasikan wacana referendurnya. Saat itu, Sidang Raya Rakyat Aceh untuk Keadilan (Sira Rakan) menggelar jajak pendapat tak resmi,

menghasilkan 95% suara responden memilih merdeka (pisah dari Indonesia) (Kumparan, 2019).

Lalu, Aktivistis dalam TAN juga secara aktif mencari cara untuk membawa masalah ke agenda publik, mengemasnya dengan baik dalam kondisi yang cocok untuk di advokasikan. Lainnya, mereka juga menampilkan masalah dengan menggabungkan masalah lama dan baru, di mana mereka berupaya untuk merubah pemahaman aktor lain dengan kepentingan yang mereka bawa (Keck & Sikkink, 1998, hal. 95).

Dengan berdirinya ASNLF pada 4 Desember 1976, gelombang anggotanya mulai merambah ke dalam organisasi ini. Idenya sangat sederhana, anti-Jawa karena mereka adalah penjajah, sama halnya dengan Belanda pada saat perang dengan Aceh. Belanda digariskan sebagai ilegal status dalam menguasai wilayah Aceh, sedangkan Jawa ilegal status dalam pengerukan sumber daya alam Aceh. Karena semua hal tersebut telah legal menurut ASNLF, Aceh sebagai negara sebelum Belanda menyerang. Maka sebab itu, kedua Negara tersebut dianggap sebagai 'penjajah' (Tiro, 1986, hal. 7). Upaya ini dilakukan oleh ASNLF dengan menuliskan selebaran-selebaran indoktrinasi yang dicetak dan disebarakan kepada masyarakat (The Hasan Tiro Center, 2016).

Sementara itu dengan adanya perkumpulan Diaspora Aceh di luar negeri, menambah semaraknya anggota masyarakat lokal dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ikut bergabung. Disinyalir puluhan ribu, ikut dalam perjuangan kemerdekaan ini. Di antaranya semua kalangan tergabung yakni ada dari Akademisi, Praktisi, Ulama, Pengusaha maupun individu lainnya. Namun, nama

ASNLF dibajak oleh aktivis GAM saat kesepakatan perdamaian antara RI-GAM terjadi (Ali, 2019). Alhasil, perpecahan internal mulai terjadi.

Jaringan ini terbentuk melalui bersatunya sejumlah besar individu yang berbeda-beda, ada yang dari pribadi, profesional maupun organisasi yang bertujuan untuk mempengaruhi pandangan dunia (Keck & Sikkink, 1998, hal. 91). Jaringan ini dapat berupa sekutu internasional, ada yang dari organisasi di negara lain dan ada yang memiliki visi dan misi yang serupa dalam konsentrasi masalahnya (Keck & Sikkink, 1998, hal. 93). Dengan kedua hal tersebut, dukungan dari aktor lain, menambah kekuatan gerakan lokal untuk menekan negaranya dari luar (Keck & Sikkink, 1998, hal. 93).

Mula-mula upaya ASNLF dalam membentuk sekutu internasional sudah dilakukan pada tahun 1980an ketika Hasan Tiro masih menjabat sebagai Wali Negara. ASNLF telah mengirimkan surat memorandum sebagai negara berdaulat kepada The Lord Avebury, London dan The World Council of Churches, Switzerland dan memperkeras pernyataan bahwa kelompok ini bukan dari golongan agama (Tiro, 1992, hal. 4). Surat ini juga dibalas oleh salah satu *council* di Inggris, dengan menyatakan bahwa tengah dalam pendalaman informasi terkait pelanggaran HAM di Aceh untuk nantinya akan mengundang media internasional dalam melirik kasus ini (Hasan Tiro Centre, 2016, 1).

Sebagaimana sekutu-sekutu lainnya, seperti anggota bangsa-bangsa di bawah organisasi internasional UNPO belum solid dalam memperjuangkan kemerdekaannya secara bersama-sama (Gani, 2019). Namun jaringan mereka telah terkoneksi dengan organisasi pergerakan lainnya dalam advokasi masalah yang sama. Terkhusus di wilayah Indonesia mereka terjaring dengan OPM dan RMS

sebagai jaringan yang memiliki wacana bersama. Akan tetapi, mereka tidak tegas dalam dukungan simbiosis mutualismenya antar anggota UNPO ketika menyuarkan kemerdekaanya (Gani, 2019).

Jaringan ini juga mempromosikan konvergensi norma, konvergensi ini melirik pada sentralitas nilai-nilai atau ide-ide yang mempunyai prinsip kuat (Keck & Sikkink, 1998, hal. 91). Dengan semangat, jika gerakan lokal tersebut dapat memberikan perbedaan informasi dan strategi cemerlang dalam menargetkan tujuan dari kampanye mereka. Lalu, jaringan ini mempromosikan atau mengkampanyekan norma tersebut sebagai upayanya menekan 'aktor target' dalam mempengaruhi kebijakannya dengan mengikuti aturan internasional.

Adapun, paparan dari gerakan ASNLF dalam mengkampanyekan kemerdekaan Aceh belum sampai pada tahap menekan pemerintah Indonesia. Termasuk upayanya melampirkan kejadian pelanggaran HAM berat di Aceh lewat meja internasional sewaktu Daerah Operasi Militer (DOM) yang dekritnya kembali keluar di era Megawati (2001-2004). Dalam acara yang diselenggarakan UNPO 14 Juni 2016, gerakan ASNLF membeberkan masalah tentang lemahnya penyelesaian HAM di Aceh melalui perjanjian MoU Helsinki. ASNLF mengatakan, alternatifnya adalah dengan menyerukan komunitas internasional untuk menghormati tuntutan rakyat Aceh dalam keadilan dan penentuan nasib sendiri (ASNLF, 2016). Namun sikap ini belum dapat dikatakan secara *de facto*, jika komunitas internasional sepakat untuk menyatu dalam menyuarkan hak kemerdekaan Aceh dan menekan Pemerintah Indonesia. Karena sampai saat ini, tidak ada pernyataan resmi terhadap dukungan gerakan ASNLF.

*Boomerang pattern* telah menggambarkan bahwa strategi untuk membeberkan tekanan pada negara target, juga melalui tekanan dari *intergovernmental organization* (Keck & Sikkink, 1998, hal. 93). Mereka mulai mempengaruhi posisi diskursif ketika mereka membujuk negara atau organisasi internasional untuk mendukung deklarasi internasional atau mengubah posisi kebijakan domestik terhadap permasalahan yang di advokasikan (Keck & Sikkink, 1998, hal. 98). Sebagai halnya, menekan negara-negara pendukung atau organisasi internasional untuk membuat komitmen yang lebih mengikat dengan menandatangani konvensi dan kode etik terhadap masalah yang di advokasikan (Keck & Sikkink, 1998, hal. 98).

Sebagaimana ASNLF, hanya dapat berkomitmen penuh dengan salah satu atau organisasi internasional yakni UNPO sebagai Organisasi Bangsa-bangsa dan Rakyat yang tidak Terwakili. Gerakan ASNLF, terdaftar menjadi members pada tahun 1991. Adapun aturan-nya mengikat, menyepakati tidak adanya kekerasan (*non-violence*) dalam upaya memperjuangkan nasib sendiri. Komitmen bersama ini sangat diskursif dan substansi, terutama dalam memperdebatkan kepentingan yang diperjuangkan. Namun, peran UNPO belum mampu menekan dan membantu secara signifikan terhadap kepentingan gerakan ASNLF.

Adapun mereka hanya memfasilitasi, seperti *forum on minority issues* yang diselenggarakan oleh UNPO 24-25 November 2016 di Jenewa, Swiss. Forum ini merupakan ajang untuk membahas masalah nasional yaitu etnis dan bahasa untuk kaum minoritas. Perdebatan di dalam acara ini tidak mengeluarkan kesepakatan apapun, hanya saling tuding menuding antara kedua belah pihak yakni ASNLF dan



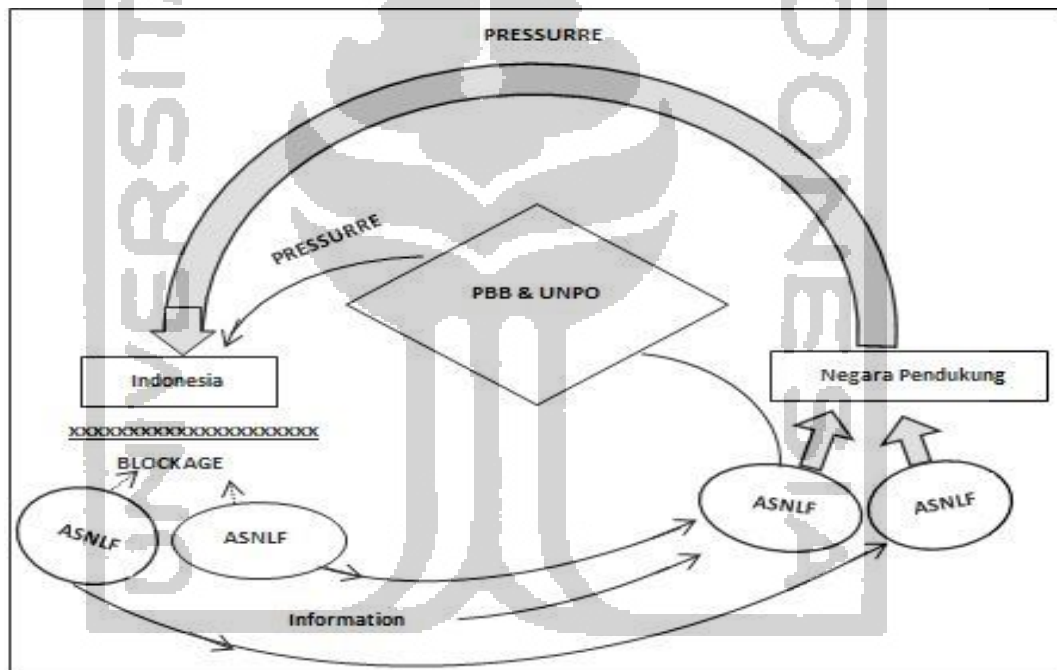
Indonesia. Perwakilan ASNLF yakni Asnawi Ali memaparkan masalah sebelum Pra dan Pasca MoU Helsinki yaitu :

“Meminta perubahan dasar pada institusi sipil dan diberdayakan serta tidak adanya lagi kekebalan hukum dan impunitas kepada elit negara, lalu masyarakat Aceh masih menginginkan hak politik, sosial dan budayanya”( JurnalAceh, 2016).

Sedangkan Perwakilan Indonesia dari Sekretaris Duta Besar Jenewa yakni Sondang Anggraini, membantah tudingan dari ASNLF. Menurutnya,

“Indonesia merupakan negara yang menghormati HAM dan memiliki kebebasan ekspresi bagi warga negaranya” (JurnalAceh, 2016).

**Gambar 4. Pola Bumerang dalam Gerakan ASNLF**



Sumber: (Gambar diolah dari Keck & Sikkink, 1998, hal. 13).

Pola bumerang tersebut menjelaskan, *Pertama*, jaringan ini mulai melahirkan advokasi terhadap hasil dari perhatian publik dengan masalah baru (Keck & Sikkink, 1998, hal. 98). Semua itu diupayakan untuk mengatur agenda ketika mereka mulai melancarkan perhatian khusus kepada media, debat, audiensi,

dan pertemuan tentang isu-isu yang dipermasalahkan (Keck & Sikkink, 1998, hal. 98).

Adapun, munculnya ASNLF berhasil melakukan aksi provokatif yang telah dilakukannya dengan menerbitkan selebaran indoktronisasi, yang diterjemahkan dalam bahasa Aceh kepada masyarakat Aceh. Hal ini membuktikan jika munculnya gerakan ASNLF sebagai semarak bersama terhadap penyelewengan sejarah. Dibuktikan pula dengan terbangnya 1000 personil yang bersedia untuk ikut dalam pelatihan militer di Libya pada tahun 1986-1987 (Tempo, 2003).

*Kedua*, jaringan ini berupaya mempengaruhi posisi diskursif dalam membujuk negara dan organisasi internasional untuk ikut mendukung kesepahaman internasional sebagai cara mengadopsi dan merubah kebijakan domestik atas masalah yang di advokasikan. Sebagai halnya, negara pendukung atau organisasi internasional menyepakati komitmen bersama yang mengikat dengan menandatangani konvensi dan kode etik atas permasalahan ini (Keck & Sikkink, 1998, hal. 98).

Berbeda halnya dalam konteks internasional, komitmen global antara ASNLF dan UNPO belum berhasil menekan pemerintah Indonesia, dimulai dari tahun 1999-2019. UNPO hanya sebagai fasilitator dan belum dapat memosisikan dengan tegas dalam membantu secara preventif terhadap upaya kemerdekaan Aceh. Sebab, organisasi internasional ini hanya sebagai tempat bangsa-bangsa yang menangis dan mengadu nasib bersama (Gani, 2019). Sedangkan negara-negara pendukungnya secara *de facto* dan *de jure* belum resmi mendukung perjuangan gerakan ini. Adapun, Libya dan Iran sebelum tahun 1990-an hanya mampu memfasilitasi dan mempersenjatai gerakan ini. Justru ini berbahaya bagi

keselamatan perjuangan gerakan ASNLF karena mudah untuk dikendarai kekuatannya dari belakang, demi kepentingan yang tidak terlihat.

## **2.2 *Political Entrepreneurs* dalam Gerakan ASNLF**

Aktivis merupakan orang yang sangat peduli terhadap beberapa masalah tertentu, Keck & Sikkink menyebut mereka dengan '*political entrepreneurs*' yakni orang yang merintis dan membentuk jaringan pertama kali, di mana mereka juga yang menjadi aktor dalam kemunculan suatu isu yang di advokasikan (Keck & Sikkink, 1998, hal. 93). Aktivis sering kali menggemakan perhatian kepada masalah yang di advokasikan dengan mengadopsi norma dan nilai-nilai, lalu diimplementasikannya dalam tindakan persuasif untuk memperluas jaringannya (Keck & Sikkink, 1998, hal. 93).

Isu separatisme di Aceh memang sangat seksi dan menjadi perhatian khususnya dalam domestik, terutama sebelum terjadinya perjanjian MoU Helsinki. Setelah nama ASNLF dibajak menurut perwakilan dari Koordinator Sweden sekarang, justru kehadiran gerakan Pasca MoU Helsinki mulai meredup (Ali, 2019). Ada dua fase penting di dalam upaya ASNLF memerdekakan Aceh dari Indonesia yang dimotori oleh aktivis-aktivisnya. Fase pertama, Hasan Tiro (1976-2005) sebagai Wali Negara ASNLF dan fase kedua, Arif Fadillah sebagai Ketua Presidium ASNLF (2012-2019). Pasang surutnya gerakan ini dapat dilihat dari dua fase tersebut, dimulai dari perpecahan internal sampai pada penyatuan kembali solidaritas aktivisnya.

Adapun pasca MoU Helsinki, gerakan ASNLF sempat terdiam selama enam tahun 2006-2011, namun tidak ada secara resmi yang menyatakan bubar terhadap gerakan ini. Terputusnya perjuangan ini alih-alih diakibatkan dari pelopor gerakan

ASNLF yaitu Hasan Tiro, tidak bisa melanjutkan kembali perjuangannya karena penyakit yang mengidapnya membuat sang pelopor menjadi pikun hingga pada tahun 2010 beliau meninggal (Gani, 2019).

Namun wasiat terakhir Hasan Tiro untuk terus melanjutkan perjuangan ASNLF, tidak bisa dilanjutkan oleh faksi yang terpecah pada saat itu yaitu MP-GAM karena kendalanya Hasan Tiro masih di bawah kelompok GAM yang menjadi perwakilan damainya dengan RI (Gani, 2019). Resiko konflik antar masyarakat bawah cenderung besar ketika kedua perjuangan faksi yang terpecah saling berkonfrontasi.

Maka setelah Hasan Tiro meninggal pada tahun 2010, ASNLF resmi menajutkan diri pada tahun 2012. Mereka para aktivis atau Diaspora Aceh di Luar Negeri menganggap perwakilannya adalah sebagai pelopor baru dari keberlanjutan gerakan ini, yang di antara anggotanya tersebut tidak memiliki afiliasi atau mantan anggota ASNLF masa lalu. Hingga struktur Gerakan ASNLF kembali terbentuk dan terpilih pula secara musyawarah Arif Fadillah menjadi Ketua Presidium (Ali, 2019).

### **2.2.1 Fase Hasan Tiro**

Pada tahun 1999, Hasan Tiro mulai banyak mendapatkan dukungan Diaspora Aceh di Luar negeri seperti di Amerika Serikat, Australia, Skandinavia, Malaysia, Thailand dan lainnya (Missbach, 2012, hal. 104-122). Untuk mengkollektifkan semangat perjuangan gerakan ASNLF ini. Tahun 2001, diperkirakan Diaspora Aceh terdiri antara 2.000 dan 3.000 orang di Malaysia dan 8.000 lainnya secara permanen berada di Thailand, Australia, Eropa dan Amerika (Ansori, 2012, hal. 33). Sementara itu dalam kondisi lokal, beliau terjun ke Aceh

untuk proses melakukan indoktrinasi dalam membangun ‘harga diri tinggi orang Aceh’ yang lahir dalam selebarannya berjudul “*Atjèh Bak Mata Dónja*” (Hasan Tiro Center, 2019, hal 64). Akibatnya, pada tahun 2000 ASNLF menarik tambahan dari instrumen militernya yang beranggota 24.000 dan kesemuanya dilaporkan berhasil mengendalikan 80% desa-desa di Aceh (Ross, 2005, p. 24).

Adapun, sokongan dana gerakan ini mulai digencarkan ketika keanggotaan mulai bertambah banyak. Ditariknya iuran-iuran wajib dari desa-desa, dugaan atas pemasukan penanaman ilegal ganja di Aceh dan menghimpun kewajiban membayar *pajak nanggroe* (pajak negara), negara yang dimaksud adalah Aceh (Missbach, 2012, hal. 153). Sampai pada usahanya melobi negara seperti Iran dan Libya untuk membantu Aceh dalam memfasilitasi pelatihan dan persenjataan. Maksud ini adalah sebagai upayanya menginternasionalisasikan konflik, agar para pelaku internasional pada akhirnya dapat ditarik dalam proses penentuan nasib sendiri (Aspinall, 2005, hal. 8).

Beliau juga berterima kasih dengan kehadiran UNPO sebagai organisasi yang dapat membantu jalannya diplomasi ASNLF, karena PBB dianggap masih belum terlepas dengan bangsa penjajah (ASNLF, 1997). Beliau juga mempertegas bahwa Aceh telah berdaulat sebagai negara adalah legal statusnya (Tiro, 1986, hal. 9). Salah satunya, saat ini tengah mengupayakan untuk menerangkan kembali sejarahnya melalui UNPO dan ingin menyambung negaranya yang telah terputus atau disebut sebagai (*successor state*) (Tiro, 1986, hal. 9).

Namun di saat masa perundingan damai tahun 2005, gerakan ASNLF sudah mulai kendur perjuangan, ketika Hasan Tiro juga telah lemah secara fisiknya. Ditambah pula dengan perpecahan internal di gerakan ini yang terbagi antara faksi

Dr. Husaini Hasan dan Dr. Zaini Abdullah akibat masalah ringan perbedaan pendapat pemilihan tempat rapat. Akhirnya, hal ini dipropaganda oleh oknum internal ASNLF dengan membawa masalah pribadi yang menyebabkan terbentuknya Majelis Pemerintahan GAM (MP-GAM), sebagai kelompok yang mengatasnamakan di bawah kepemimpinan Dr. Husaini Hasan (TVOne, 2013). Akan tetapi hal ini dibantah oleh seorang Kepala Biro Penerangan ASNLF yaitu Yusra Abdul Gani, jika permasalahan ini bukan berbuntut dari persoalan pemilihan rapat. Sebab, indikasi perpecahan sudah diinisiasi dengan rapat-rapat tertutup yang dilakukan oleh faksi Dr. Husaini Hasan sebelum momentum pemilihan tempat rapat terjadi (Gani, 2019).

Perbedaan pendapat ini yang menyebabkan pada masa 1999-2005, terjadi pelemahan upaya ASNLF untuk kembali mengikrarkan gerakannya dalam menekan pemerintah atas advokasi masalahnya. Maka faksi Dr. Zaini Abdullah mulai menerima pemerintah untuk membicarakan proses perdamaian. Sedangkan, faksi Dr. Husaini Hasan terlampaui minimnya dukungan yang menyebabkan proses mencari pengakuan kemerdekaan menjadi terhambat, dan faksi ini tidak jantan mendeklarasikan kembali keinginannya untuk merdeka (Gani, 2019).

Faktor aktivis dalam memunculkan isu kemerdekaan pada tahun 1999-2005 mulai tidak solid. Kehilangan identitas aktor utama dalam *political entrepreneurs* gerakan ASNLF menjadi faktor penting dalam kegagalan pada masa tersebut. Sebab, masyarakat mulai merasa bingung kepada advokasi masalah yang diperjuangkan oleh gerakan ini. Lalu, musibah Tsunami pada 26 Desember 2004 juga menjadi traumatik masyarakat Aceh pada keadaan spiritualitasnya. Akibatnya, perjanjian perundingan damai MoU Helsinki disetujui oleh faksi-faksi aktivis yang

mewakili gerakan ini. Akan tetapi, keberhasilan pertumbuhan jaringan pada fase ini tidak terlepas dari besarnya simpatik masyarakat atas perjuangan gerakan ASNLF yang lahir atas dasar peranan penting aktivis jaringan ASNLF.

### **2.2.2 Fase Arif fadhillah**

Setelah pasca MoU Helsinki yaitu perjanjian damai antara RI-GAM pada tahun 2005 silam. ASNLF terus bergerak dan tidak pernah putus, karena menganggap bahwa perjanjian tersebut memang tidak kena mengena atas nama gerakan ASNLF. Bahwa bukti hitam di atas putihnya adalah yang meneken perjanjian MoU Helsinki itu adalah faksi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) (Ali, 2019).

Pada 6-8 April 2012, di Bronderslev, Denmark, diputuskan bahwa menggunakan nama ASNLF untuk menggerakkan roda perjuangan, karena organisasi ini memang tidak pernah dibubarkan (Ali, 2019). Para aktivis atau Diaspora Aceh di Luar negeri ini bersepakat kembali untuk mengaktifkan perjuangan ASNLF dalam upayanya membebaskan diri dari Aceh. Terutama mereka yang tidak terdaftar atau terafiliasi oleh aktivis GAM pengatasnamaan perjanjian damai (Ali, 2019).

Di bawah kendali Arif Fadillah sebagai Ketua Presidium ASNLF, sepakat jika Diaspora Aceh ini mengamanahi beliau dengan musyawarah untuk menjabat dan melanjutkan perjuangan bersama. Di antaranya mereka sudah berhasil membawa perkara Aceh ke forum-forum internasional seperti United Nation (UN) dan European Union (EU) melalui organisasi UNPO. Adapun UNPO ikut membantu dan bekerjasama dalam memberikan edukasi kepada anggotanya tentang mekanisme Uni eropa dan PBB (Ali, 2019).

Jaringan aktivis fase kedua ini, dominan melakukan diplomasi internasional dalam upaya melobi aktor pendukung. Memfokuskan pada perjuangan politik, diplomasi, *non-violence* dan terakhir baru senjata untuk mempertahankan diri (Ali, 2019). Sementara untuk perkembangan isu, aktivis ini mulai menarik eksistensinya lewat agenda internasional. Seperti, keterlibatannya dalam forum *Universal Periodic Review* (UPR) di Dewan HAM PBB, Jenewa, Swiss. Mereka mengirim sanggahan atas nota keberatannya yang disampaikan kepada sejumlah negara dan organisasi internasional terkait laporan Pemerintah Indonesia tentang penegakan HAM di Aceh (Serambi, 2017).

Aktivis pada masa ini layak disebut sebagai *political entrepreneurs* karena mereka hadir dengan misi yang baru dalam memunculkan sebuah isu dan memperjuangkan advokasinya. Keck dan Sikkink mengatakan bahwa aktivis yaitu orang yang merintis dan membentuk jaringan pertama kali, di mana mereka juga yang menjadi aktor dalam kemunculan suatu isu yang di advokasikan (Keck & Sikkink, 1998, hal. 93). Adapun mereka merintis kembali Gerakan ASNLF dengan nilai dan norma yang telah berbeda dari sebelumnya. Terkhusus pada perjuangan politiknya dengan metode yang lebih preventif yakni diplomasi dan tanpa menggunakan kekerasan. Lalu, mencari eksistensi melewati jalan dan mekanisme kelembagaan serta aliansi-aliansi legal di bawah organisasi UNPO (Ali, 2019).

Faktor aktivis dalam memunculkan isu kemerdekaan pada tahun 2012-2019 merupakan langkah baru dalam melibatkan organisasi internasional untuk menghadirkan Indonesia sebagai posisi diskursif untuk membicarakan masalah yang di advokasikan. Namun, belum terlalu efektif menekan Pemerintah Indonesia. Sebab, euforia domestik terhadap upaya untuk merdeka sudah menurun. Dan



ASNLF juga mengatakan, hal ini merupakan bagian dari kendalanya untuk menarik dukungan domestik (Ali, 2019).

Sedangkan menurut Keck dan Sikkink, *political entrepreneurs* dalam jaringan TAN, diidentifikasi sebagai organisasi maupun individu di mana mereka dapat menggerakkan sumber dayanya untuk melancarkan informasi dan keanggotaan serta mencari peluang politik cerdas ketika beroperasi (Keck & Sikkink, 1998, hal. 91). Sementara fase ASNLF pada tahun 1999-2005, telah berhasil menarik dukungan domestik, namun belum mampu menekan Pemerintah Indonesia dari luar. Selanjutnya, fase ASNLF pada tahun 2012-2019, telah berhasil mencapai langkah awalnya menarik dukungan internasional dalam menekan Pemerintah Indonesia dari luar, namun belum mampu menarik simpatik masyarakat Aceh.

*Political entrepreneurs* sendiri menciptakan norma yang dilayangkan untuk mendapat perhatian kolektif, sebagai maksud memberikan dampak konstitusi terhadap negara (Keck & Sikkink, 1998, hal. 93). Para aktivis ini merupakan *network* penting dalam kampanye isu yang mereka advokasikan dalam jaringan TAN (Keck & Sikkink, 1998, hal. 93). Tentunya bagi mereka yang mahir dalam mengadvokasikan masalah jaringan ini (Keck & Sikkink, 1998, hal. 93).

### **2.3 *International Conference and International Organization* yang mendukung Gerakan ASNLF**

Organisasi dan konferensi internasional menyediakan peluang terbukanya akses bagi masuknya jaringan advokasi transnasional (Keck & Sikkink, 1998, hal. 93). Nantinya, *political entrepreneurs* akan memanfaatkan organisasi-organisasi internasional maupun konferensi internasional yang memiliki kesadaran pada

konsentrasi masalah serupa dengan jaringan advokasi untuk memperluas kontak internasional (Keck & Sikkink, 1998, hal. 93). Kontak internasional jaringan ini yang merupakan salah satu faktor terbentuknya TAN setelah *political entrepreneurs* mengadvokasikan isu secara aktif (Keck & Sikkink, 1998, hal. 93).

Dengan keberadaan UNPO, sebagai Organisasi Bangsa-bangsa dan Rakyat yang tidak Terwakili merupakan sebagian tempat bagi masuknya ASNLF. UNPO dianggap sebagai payung dalam mempromosikan perjuangan anggotanya melalui forum-forum internasional. Lalu, UNPO juga memberikan pelatihan diplomat dan *workshops* mengenai mekanisme aktivitas di PBB (Ali, 2019).

Organisasi internasional ini juga mempertemukan antara bangsa-bangsa yang tidak terwakili, dan dapat bertukar pikiran antar aktivisnya. Seperti, yang dilakukan Aceh, Maluku dan Papua mereka terjaring dalam wacana bersama untuk kolektif membebaskan diri dari Indonesia (Ali, 2019). Pada 6 September 2019, mereka juga serentak melakukan aksi di depan konsulat Indonesia di Den Haag, Belanda (Koordinator Sweden, 2019).

Begitu pula yang dikatakan Hasan Tiro sebagai *political entrepreneurs* fase pertama, bahwa UNPO sangat menguntungkan bagi perjuangan Aceh. Beliau meminta terus mempertahankan organisasi ini sebagai alat untuk diplomasi internasionalnya. Karena nantinya negara-negara yang telah berhasil mendapatkan hak kemerdekaannya akan terhubung dengan bangsa yang tidak terwakili untuk dapat saling memberikan dukungan secara legal (ASNLF, 1997).

Lalu, UNPO juga membuat agenda forum internasional. Seperti, *forum on minority issues* yang diselenggarakan pada 24-25 November 2019 di Jenewa, Swiss. Di antaranya mempertanyakan komitmen Indonesia dalam menyelesaikan

HAM di Aceh. Menjadi fasilitator dalam sebuah konferensi dengan Anggota Parlemen Eropa, yang berlangsung di Gedung Parlemen Uni Eropa di Brussels, Belgium. Meminta kepada Uni Eropa untuk terlibat secara aktif untuk mengawal keadaan di Aceh dan mendukung rakyat Aceh dalam memperjuangkan hak menentukan nasib sendirinya (Acehsatu, 2016).

Konferensi internasional ini salah satunya telah memperkuat masuknya jaringan advokasi transnasional (Keck & Sikkink, 1998, hal. 93). Proliferasi organisasi dan konferensi internasional juga memberikan ruang kepada terbentuknya komunikasi dan diplomasi antar jaringan (Keck & Sikkink, 1998, hal. 93). Adapun, ASNLF fase 2012-2019 fokus pada pembentukan kontak internasional ini, terutama untuk menekan pemerintah Indonesia dari luar. Seturut dengan yang dikatakan oleh Yusuf Daud sebagai Wakil Presidium ASNLF 2016-2020 dalam wawancaranya di Jurnalatjeh. Bahwa mereka fokus dalam membangun diplomasi dengan aktor internasional (Koordinator Sweden, 2012).

Sementara kajian dalam bab dua ini, telah dideskripsikan secara rinci faktor munculnya jaringan advokasi. Sebagaimana ASNLF telah terpenuhi ketiga karakteristiknya sebagai jaringan advokasi. Dengan paparan di atas, gerakan ASNLF telah terbukti validitasnya di antara ketiga hal tersebut dimulai dari *boomerang pattern, political entrepreneurs and international conference and international organization*. Selanjutnya, dari bab 3 akan meneruskan analisis dari upayanya ASNLF sebagai jaringan advokasi dalam melancarkan aktivitasnya memperjuangkan kemerdekaan Aceh.